

IMPLEMENTASI PROGRAM SIMPAN PINJAM BUMDES DALAM PENINGKATAN UMKM MASYARAKAT DESA KEDUNGPENGARON KABUPATEN LAMONGAN

Shofiyatul Jannah¹, Hirshi Anadza², Taufiq Rahman Ilyas³

*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: shofiyah.jannah14@gmail.com*

ABSTRAK

Pembangunan desa menjadi langkah strategis pemerintah untuk menggenjot kesejahteraan warga melalui penguatan sektor ekonomi lokal. Salah satu wadah utama yang dibentuk adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), yang berfungsi sebagai penggerak ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi daerah setempat. Di antara berbagai bidang usahanya, unit simpan pinjam menjadi program yang paling banyak diterapkan guna memperluas akses pembiayaan bagi warga, terutama para pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes dalam memajukan UMKM di Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, sekaligus memetakan faktor pendorong serta kendalanya di lapangan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil studi mengindikasikan bahwa operasionalisasi program simpan pinjam BUMDes Kedung Bersama sudah berlangsung dengan baik. Program ini terbukti memberi dampak positif bagi perkembangan UMKM lokal berkat kemudahan pinjaman modal, koordinasi antarlembaga yang solid, serta ketersediaan sumber daya pendukung yang mencukupi. Keberhasilan program ini didorong oleh tingginya kebutuhan modal usaha warga, dukungan penuh dari pemerintah desa, syarat peminjaman yang tidak berbelit-belit, serta besarnya rasa percaya masyarakat terhadap BUMDes. Di sisi lain, pelaksanaan program masih menghadapi beberapa hambatan di lapangan, seperti pemahaman keuangan masyarakat yang masih terbatas, adanya keterlambatan pembayaran angsuran, alokasi dana BUMDes yang belum memadai, serta pembinaan usaha bagi para peminjam yang belum optimal. Kendati demikian, secara keseluruhan program simpan pinjam BUMDes ini tetap berkontribusi nyata dalam menyokong keberlanjutan UMKM serta memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat desa.

Kata Kunci: Implementasi Program, BUMDes, Simpan Pinjam, UMKM, Pemberdayaan Masyarakat.

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi desa menjadi salah satu fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan potensi lokal. Desa memegang peranan krusial mengingat mayoritas penduduk Indonesia masih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian serta usaha kecil. Namun, masyarakat desa masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan akses permodalan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya akses pasar, serta minimnya kemampuan pengelolaan usaha. Kondisi tersebut menyebabkan UMKM belum bisa berkembang maksimal, sehingga dibutuhkan kebijakan yang benar-benar bisa menopang ekonomi masyarakat.

Sebagai upaya mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menerbitkan Regulasi dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan kemandirian desa untuk mengelola potensi lokalnya lewat BUMDes. Berperan sebagai motor penggerak ekonomi warga, BUMDes menghadirkan berbagai jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan setempat, termasuk program simpan pinjam. Kehadiran unit ini mempermudah pelaku UMKM dalam memperoleh permodalan berkat syarat yang ramah, bunga efisien, dan mekanisme yang tidak rumit.

Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan merupakan salah satu desa yang mengembangkan program simpan pinjam melalui BUMDes Kedung Bersama sejak tahun 2020. Program ini hadir sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh modal usaha dari perbankan karena keterbatasan persyaratan administrasi maupun jaminan. Melalui mekanisme pinjaman yang lebih mudah dan terjangkau, program simpan pinjam diharapkan mampu mendukung pengembangan usaha masyarakat, khususnya UMKM.

Pelaksanaan program tersebut menunjukkan hasil yang cukup positif. Jumlah pelaku UMKM di Desa Kedungpengaron mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya jumlah masyarakat yang memanfaatkan layanan simpan pinjam BUMDes. Masyarakat menilai program ini lebih mudah diakses karena lokasi pelayanan yang dekat, persyaratan sederhana, serta cicilan dan bunga yang lebih ringan

dibandingkan lembaga keuangan konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa program simpan pinjam BUMDes telah memberikan kontribusi dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku UMKM.



Grafik 1. Peningkatan Jumlah Pelaku UMKM Desa Kedungpengaron Tahun 2020-2025

Sumber: Data Diolah Peneliti

Meskipun demikian, implementasi program simpan pinjam BUMDes masih menghadapi sejumlah kendala. Tidak seluruh masyarakat dapat mengakses layanan pinjaman karena adanya mekanisme seleksi calon peminjam untuk mengurangi risiko kredit macet. Selain itu, keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan masyarakat, serta belum optimalnya pengelolaan dan pembinaan usaha menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas program. Di sisi lain, penelitian terdahulu umumnya membahas peran BUMDes secara umum, belum sepenuhnya membahas tentang program simpan pinjam BUMDes.

Berangkat dari permasalahan tersebut, riset ini bertujuan meneliti sejauh mana program simpan pinjam BUMDes berkontribusi pada kemajuan UMKM masyarakat Desa Kedungpengaron, Kabupaten Lamongan, beserta faktor pembentuk dan penghambatnya. Hasil akhirnya diharapkan menjadi bahan pertimbangan evaluatif bagi pihak desa dan pengelola BUMDes dalam memaksimalkan program.

Rumusan Masalah

Merujuk pada latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes dalam memajukan UMKM warga Desa Kedungpengaron Kabupaten Lamongan. Penelitian ini juga mengidentifikasi aspek penunjang dan penghambatnya untuk menilai sejauh mana program tersebut efektif menyejahterakan ekonomi masyarakat.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menguraikan serta menguji penerapan simpan pinjam BUMDes di Desa Kedungpengaron, Kabupaten Lamongan. Selanjutnya, penelitian ini hendak menilai sejauh mana program tersebut menopang UMKM masyarakat desa, terutama dalam penyediaan modal dan pengembangan bisnis. Penelitian ini pun bermaksud mengungkap faktor penunjang dan penghambatnya guna menyajikan pemahaman menyeluruh mengenai keberhasilan program bagi ekonomi warga.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara akademis, riset ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya terkait peran BUMDes dalam memajukan UMKM di tingkat desa. Di samping itu, temuan dalam studi ini dapat dijadikan bahan perbandingan atau rujukan bagi peneliti lain yang tertarik mengkaji tema pemberdayaan ekonomi, pembangunan desa, serta tata kelola BUMDes.

2. Manfaat Praktis

Bagi pihak aparat desa dan pengelola BUMDes, hasil riset ini bisa menjadi evaluasi nyata untuk memperbaiki sistem tata kelola, eksekusi, serta pengawasan layanan simpan pinjam agar makin transparan, efisien, dan pas sasaran. Sementara bagi warga atau pemilik usaha kecil, penelitian ini memberikan gambaran tentang manfaat akses modal BUMDes untuk memperbesar skala bisnis dan memajukan taraf hidup mereka.

Tinjauan Pustaka

Teori Implementasi Kebijakan Dalam Kerangka Desentralisasi

Implementasi kebijakan publik dalam pembangunan desa tidak dapat dipisahkan dari sistem desentralisasi, yaitu pemberian wewenang dari pusat kepada pemerintah daerah maupun desa untuk mengurus dan mengeksekusi urusan pemerintahan yang selaras dengan kebutuhan warga setempat. Dalam konteks ini, desa

memiliki ruang untuk mengembangkan potensi lokal, termasuk melalui pengoperasian BUMDes yang difungsikan sebagai wadah penggerak ekonomi masyarakat. Sementara itu, implementasi kebijakan diartikan sebagai alur kerja yang mengubah rencana tertulis menjadi aksi nyata demi meraih hasil yang diinginkan. Keberhasilan dipengaruhi berbagai faktor, terutama dalam sistem pemerintahan yang terdesentralisasi.

Studi ini mengadopsi pendekatan implementasi kebijakan Cheema & Rondinelli yang menitikberatkan pada empat indikator utama: kondisi lingkungan sekitar, relasi antar-organisasi, dukungan sumber daya, dan kapasitas agen penanggung jawab. Model tersebut dinilai relevan untuk menganalisis implementasi program simpan pinjam BUMDes karena program ini merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan desa dalam kerangka desentralisasi administratif. Melalui program simpan pinjam, pemerintah desa dan pengelola BUMDes berperan dalam menyediakan akses permodalan bagi pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas usaha dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, teori implementasi kebijakan menjadi landasan penting untuk memahami keberhasilan pelaksanaan serta mendukung pengembangan ekonomi warga desa.

Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah langkah terencana untuk mengasah keterampilan, memperluas kesempatan, dan memperkuat kedudukan warga agar mampu mencukupi kebutuhan serta menaikkan taraf hidup mereka secara mandiri. Sejalan dengan pandangan Mardikanto dan Soebiato dalam Hamid (2018), konsep ini berfokus pada penguatan kelompok rentan yang terbatas secara ekonomi maupun sosial. Pemberdayaan bukan sekadar membagikan bantuan, melainkan membangun kapasitas warga agar sanggup tumbuh dan bersaing

Pemberdayaan masyarakat juga dipahami sebagai tindakan sosial yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Gunawan (2009) dalam Hamid (2018) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat terjadi ketika anggota komunitas mampu mengorganisasikan diri, memanfaatkan sumber daya yang tersedia, serta melakukan tindakan kolektif untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dengan demikian, masyarakat bukan sebagai pelaksana kebijakan, melainkan menjadi penentu dan pemeran utama dalam setiap tahapan pembangunan.

Konsep ini menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan melalui keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan serta penguatan kapasitas untuk mengelola potensi yang dimiliki secara berkelanjutan. Pendekatan ini menjadi penting karena pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi sering kali belum mampu menjawab kebutuhan kelompok masyarakat yang lemah.

Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah menciptakan kemandirian dan memperkuat posisi tawar masyarakat, terutama kelompok yang berada dalam kondisi lemah secara ekonomi maupun sosial. Keberhasilan pemberdayaan dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengakses sumber daya, memperluas peluang usaha, serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kehidupannya. Dalam penelitian ini, teori pemberdayaan masyarakat digunakan untuk menganalisis sejauh mana kapasitas, kemandirian, pelaku UMKM di Desa Kedungpengaron.

Teori Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat adalah keadaan di mana kebutuhan fisik dan nonfisik setiap warga telah terpenuhi demi mewujudkan kehidupan yang bermartabat, aman, dan layak. Menurut Dahlia Sukmasari dalam Sari (2025), indikator utama kesejahteraan terletak pada ketercukupan lima kebutuhan dasar: pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Sementara itu, Adi Fahrudin dalam Haryanto dan Fitri (2019) menyatakan bahwa kesejahteraan merupakan kondisi ketika individu terbebas dari kemiskinan, kebodohan, serta rasa takut sehingga dapat hidup dengan aman dan tenteram.

Menurut Nasikun dalam Mulia (2019), kesejahteraan masyarakat diukur melalui empat indikator, yaitu kesejahteraan (welfare), rasa aman (security), jati diri (identity), dan kebebasan (freedom). Keempat indikator tersebut mencerminkan terpenuhinya kebutuhan hidup, rasa aman dalam menjalankan aktivitas, kemampuan mengembangkan potensi diri, serta kebebasan dalam meningkatkan kualitas hidup. Indikator ini digunakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kesejahteraan masyarakat dalam penelitian ini.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sejalan dengan pendapat Sugiyono (2013), penelitian kualitatif berbasis pada filsafat postpositivisme guna mengeksplorasi kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrumen kuncinya. Tujuan pendekatan ini adalah menggambarkan dan memahami realita secara mendalam tanpa rekayasa. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen diharapkan mampu memotret implementasi program secara menyeluruh.

Fokus Penelitian

Penetapan fokus penelitian bertujuan memberikan batasan yang tegas tanpa mengabaikan fleksibilitas di

lapangan. Dalam kualitatif, pembatasan ini disusun berdasarkan tingkat urgensi masalah yang dikaji. Sugiyono (2013) menyebutkan bahwa fokus riset kualitatif bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan realita di lapangan. Adanya fokus ini sangat membantu peneliti agar proses pengumpulan data tetap terarah dan tidak keluar dari batasan yang ada.

Fokus kajian pada penelitian ini memakai konsep implementasi kebijakan menurut Cheema dan Denis A. Rondinelli dalam Syafira (2023) yang dipengaruhi oleh empat indikator utama yakni, kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumber daya, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes Dalam Peningkatkan UMKM Masyarakat Desa Kedungpengaron Kabupaten Lamongan ditinjau dari indikator yang dikemukakan oleh Cheema dan Deniss A. Rondinelli dalam Syafira (2023).

Situs dan Latar Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Pemilihan lokasi dilakukan melalui teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa lokasi tersebut relevan dengan tujuan penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2013). Desa Kedungpengaron dipilih karena memiliki program simpan pinjam BUMDes yang telah berjalan aktif dan berperan dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM, sehingga sesuai untuk mengkaji implementasi program dalam mendukung peningkatan usaha masyarakat.

Sumber Data

1. Data Primer

Data primer dikumpulkan secara langsung lewat wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam kegiatan simpan pinjam BUMDes (Sugiyono, 2013). Penentuan narasumber menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni memilih pihak-pihak yang dinilai paham, berpengalaman, serta terjun langsung dalam pelaksanaan program. Adapun informan dalam studi ini mencakup pengurus BUMDes, pengelola program simpan pinjam, pelaku UMKM penerima pinjaman, dan Pemerintah Desa Kedungpengaron. Mereka dipilih karena mampu memberikan informasi yang relevan mengenai implementasi program serta dampaknya terhadap perkembangan UMKM.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2013), data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari materi ilmiah atau administrasi yang sudah tersedia, seperti arsip, laporan, dan dokumen resmi. Informasi ini berfungsi menguatkan, memperkaya, serta membandingkan data utama di lapangan. Adapun acuan data sekunder dalam riset ini meliputi:

- a) Dokumen dan arsip BUMDes Kedung Bersama Desa Kedungpengaron
- b) Dokumen pemerintah Desa Kedungpengaron
- c) Peraturan perundang-undangan
- d) Literatur Ilmiah dan Penelitian Terdahulu

Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2022) menegaskan bahwa teknik pengumpulan data menduduki posisi kunci dalam penelitian demi mencapai tujuan utamanya, yakni mendapatkan data. Pada tahap ini, pengumpulan data ditempuh lewat beberapa metode, antara lain:

1. Observasi (Pengamatan)

Sugiyono (2022) menjelaskan bahwa teknik observasi berfokus pada pengamatan kondisi objek riset secara nyata di lapangan. Penerapan observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di Desa Kedungpengaron, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan untuk mengamati pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes, meliputi peran pemerintah desa dalam koordinasi program, kegiatan pengurus BUMDes dalam pengelolaan program, serta partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat.

2. Wawancara

Sejalan dengan pemikiran Sugiyono (2022), teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan mendalam secara langsung kepada narasumber. Adapun model wawancara yang dipilih bersifat semi terstruktur atau mendalam agar peneliti memperoleh jawaban yang lebih luas dan fleksibel sesuai topik penelitian. Wawancara tersebut dilakukan kepada beberapa informan sebagai berikut:

- a. Perangkat Desa Kedungpengaron
- b. Pengurus program simpan pinjam BUMDes
- c. Masyarakat pelaku UMKM

3. Dokumentasi

Sugiyono (2022), menjelaskan bahwa dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui tulisan, arsip, foto, dan dokumen lain terkait objek penelitian. Adapun dokumentasi yang telah dikumpulkan meliputi:

- a. Foto kegiatan program simpan pinjam BUMDes
- b. Foto buku simpan pinjam
- c. Foto bersama informan
- d. Foto bersama masyarakat/ subjek

Teknik Analisis Data

Prosedur analisis dalam riset ini mengadopsi model interaktif yang dirumuskan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2014) dalam karyanya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Tahapan analisis kualitatif ini mencakup empat alur kegiatan yang saling terhubung dan berjalan secara simultan:

- 1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)**

Data dihimpun melalui kombinasi observasi, wawancara mendalam, dan penelusuran dokumen (triangulasi). Mengingat proses ini dapat memakan waktu lama, data awal yang terkumpul biasanya sangat melimpah dan bervariasi. Pada fase awal, peneliti melakukan pemetaan umum terhadap situasi di lapangan dengan mencatat serta merekam seluruh temuan demi memperoleh gambaran informasi yang utuh.

- 2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)**

Kondensasi data adalah tahap memilah, menyederhanakan, memfokuskan, serta mengelompokkan temuan agar lebih mudah dianalisis. Pada riset ini, penyederhanaan dilakukan terhadap hasil wawancara, catatan observasi, dan studi dokumen dengan mengelompokkannya ke dalam tema-tema spesifik seperti kontribusi pemerintah desa, peran pengelola BUMDes, keterlibatan warga, kendala di lapangan, serta langkah solusinya. Langkah ini dilakukan secara terus-menerus agar data yang digunakan benar-benar relevan.

- 3. Penyajian Data (*Data Display*)**

Penyajian data merupakan upaya merangkai informasi secara terstruktur agar pola hubungan antardata mudah dipahami dan ditarik kesimpulannya. Dalam studi ini, temuan disajikan lewat uraian naratif deskriptif, tabel pendukung, serta bagan alur yang memperjelas hasil kajian terkait pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes.

- 4. Penarikan dan Pengujian Kesimpulan (*Drawing and Verification Conclusion*)**

Tahap penarikan kesimpulan dijalankan secara bertahap sejak awal pengumpulan data dan terus diuji ulang untuk menjamin validitasnya. Dalam penelitian ini, kesimpulan akhir dirumuskan dari gabungan data wawancara, pengamatan, dan dokumen yang kemudian divalidasi dengan membandingkan antarsumber data sehingga menghasilkan temuan yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan dan keakuratan data, riset ini menggunakan teknik triangulasi. Mengutip pandangan William Wiersma (1986, dalam Sugiyono, 2013), triangulasi pada dasarnya adalah proses pengujian kredibilitas data lewat pemeriksaan ulang dari beragam sumber, teknik, dan kurun waktu yang berbeda. Adapun jenis triangulasi yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1. Triangulasi Sumber**

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan cara membandingkan dan mengonfirmasi informasi yang didapat dari beberapa pihak yang berbeda (Sugiyono, 2013). Dalam riset ini, Peneliti memverifikasi jawaban hasil wawancara antara Pemerintah Desa Kedungpengaron, jajaran pengurus unit simpan pinjam BUMDes, serta warga desa selaku penerima manfaat.

- 2. Triangulasi Teknik (Metode)**

Triangulasi teknik menguji keabsahan temuan dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan data secara sekaligus (Sugiyono, 2013). Peneliti membandingkan kesesuaian antara hasil wawancara, catatan dokumentasi, dan studi literatur pendukung. Cara ini dipakai agar gambaran terkait pelaksanaan program simpan pinjam BUMDes di Desa Kedungpengaron benar-benar teruji validitasnya.

- 3. Triangulasi Waktu**

Mengacu pada Sugiyono (2013), kredibilitas data juga perlu diuji melalui pengecekan ulang di waktu atau kondisi yang berbeda. Sebab, pengumpulan data yang akurat tidak cukup hanya mengandalkan satu kali interaksi. Oleh karena itu, Peneliti melakukan pengamatan dan konfirmasi lapangan secara berulang dalam rentang waktu yang bervariasi untuk memastikan data yang diperoleh tetap konsisten.

Hasil dan Pembahasan

- 1. Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes dalam Peningkatan UMKM Masyarakat Desa Kedungpengaron Kabupaten Lamongan**

Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Kedungpengaron merupakan salah satu upaya pemerintah desa dalam meningkatkan akses permodalan bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes dengan menyediakan

pinjaman modal bunga rendah serta prosedur yang mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran program ini diharapkan mampu mengatasi keterbatasan modal usaha, meningkatkan produktivitas UMKM, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, implementasi program dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Cheema dan Rondinelli yang terdiri atas empat indikator.

a) Kondisi Lingkungan

Berdasarkan hasil penelitian, kondisi lingkungan Desa Kedungpengaron mendukung pelaksanaan Program Simpan Pinjam BUMDes. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani dan pelaku usaha mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses permodalan. Sebelum adanya program, pelaku UMKM umumnya mengembangkan usaha dengan modal sendiri sehingga perkembangan usaha berjalan relatif lambat. Kehadiran program simpan pinjam memberikan alternatif pembiayaan yang lebih mudah, sehingga masyarakat dapat menambah modal usaha, meningkatkan kapasitas produksi, dan mengembangkan usahanya.

Menurut teori implementasi kebijakan Cheema dan Rondinelli, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya sangat memengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Lingkungan yang memiliki kebutuhan terhadap akses permodalan akan lebih mudah menerima program yang ditawarkan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa karakteristik masyarakat Desa Kedungpengaron sesuai dengan tujuan program sehingga implementasi dapat berjalan dengan baik. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti pendapatan masyarakat yang bersifat musiman dan sebagian penerima pinjaman yang belum memanfaatkan dana secara optimal untuk kegiatan produktif.

Dengan demikian, indikator kondisi lingkungan telah mendukung implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes karena program mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap akses permodalan dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan UMKM, meskipun masih diperlukan peningkatan pendampingan kepada penerima pinjaman.

b) Hubungan Antar Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDes terjalin dengan baik melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas. Pemerintah desa berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, penyertaan modal, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Sementara itu, pengurus BUMDes bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, proses penyaluran pinjaman, hingga monitoring pengembalian pinjaman oleh masyarakat.

Menurut Cheema dan Rondinelli, hubungan antar organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena menentukan efektivitas koordinasi antar pelaksana. Hubungan kerja sama yang baik akan memperlancar proses implementasi dan meminimalkan terjadinya hambatan administratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program simpan pinjam.

Dengan demikian, indikator hubungan antar organisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena adanya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang mendukung keberhasilan implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes.

c) Sumber Daya Organisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara Pemerintah Desa dengan pengurus BUMDes terjalin dengan baik melalui koordinasi, komunikasi, dan pembagian tugas yang jelas. Pemerintah desa berperan dalam memberikan dukungan kebijakan, penyertaan modal, pembinaan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program. Sementara itu, pengurus BUMDes bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, proses penyaluran pinjaman, hingga monitoring pengembalian pinjaman oleh masyarakat.

Menurut Cheema dan Rondinelli, hubungan antar organisasi merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan karena menentukan efektivitas koordinasi antar pelaksana. Hubungan kerja sama yang baik akan memperlancar proses implementasi dan meminimalkan terjadinya hambatan administratif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa koordinasi yang terjalin antara Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes mampu mendukung kelancaran pelaksanaan program simpan pinjam.

Dengan demikian, indikator hubungan antar organisasi dapat dikatakan telah berjalan dengan baik karena adanya komunikasi, koordinasi, dan kerja sama yang mendukung keberhasilan implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes.

d) Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan program simpan pinjam. Pengelola memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari proses pengajuan, pencairan dana, hingga pemantauan pengembalian pinjaman. Selain itu, pengurus juga berupaya memberikan kemudahan prosedur agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses modal usaha.

Menurut Cheema dan Rondinelli, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana mencakup kompetensi,

komitmen, pengalaman, serta kemampuan teknis pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Kompetensi pelaksana akan menentukan keberhasilan implementasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Dengan demikian, indikator karakteristik dan kemampuan agen pelaksana telah mendukung implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes, karena adanya komitmen dan kemampuan pengurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun peningkatan kapasitas pengelola masih diperlukan.

2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes

a. Faktor Pendukung

1. Koordinasi yang Baik antara Pemerintah Desa dan Pengurus BUMDes

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes memiliki komitmen yang baik dalam melaksanakan program simpan pinjam. Pengelola memberikan pelayanan kepada masyarakat mulai dari proses pengajuan, pencairan dana, hingga pemantauan pengembalian pinjaman. Selain itu, pengurus juga berupaya memberikan kemudahan prosedur agar masyarakat lebih mudah memperoleh akses modal usaha. Menurut Cheema dan Rondinelli, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana mencakup kompetensi, komitmen, pengalaman, serta kemampuan teknis pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Kompetensi pelaksana akan menentukan keberhasilan implementasi program. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengurus BUMDes telah menjalankan tugasnya dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan kapasitas dalam aspek administrasi, pengelolaan keuangan, dan pendampingan usaha kepada masyarakat.

Dengan demikian, indikator karakteristik dan kemampuan agen pelaksana telah mendukung implementasi Program Simpan Pinjam BUMDes, karena adanya komitmen dan kemampuan pengurus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun peningkatan kapasitas pengelola masih diperlukan.

2. Tingginya Antusiasme Masyarakat

Program simpan pinjam memperoleh respons positif dari masyarakat karena memberikan kemudahan memperoleh modal usaha tanpa persyaratan yang rumit serta tingkat bunga yang relatif rendah. Tingginya minat masyarakat menunjukkan bahwa program sesuai dengan kebutuhan pelaku UMKM.

3. Dukungan Modal dan Komitmen

Ketersediaan modal awal dari Pemerintah Desa serta komitmen pengurus dalam memberikan pelayanan menjadi faktor pendukung penting. Pengurus BUMDes berupaya memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program.

b. Faktor Penghambat

1. Keterbatasan Modal BUMDes

Permintaan pinjaman masyarakat yang terus meningkat belum sepenuhnya dapat dipenuhi karena keterbatasan modal yang dimiliki BUMDes. Kondisi ini menyebabkan sebagian masyarakat harus menunggu giliran memperoleh pinjaman.

2. Keterlambatan Pengembalian Pinjaman

Beberapa penerima pinjaman mengalami keterlambatan dalam mengembalikan angsuran akibat pendapatan usaha yang tidak stabil, terutama bagi masyarakat yang bergantung pada hasil pertanian musiman.

3. Pemanfaatan Dana yang Belum Sepenuhnya Produktif

Masih terdapat sebagian masyarakat yang menggunakan dana pinjaman untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehingga tujuan program dalam meningkatkan perkembangan usaha belum tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan dan pengawasan agar dana pinjaman lebih difokuskan pada kegiatan usaha produktif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset, Hasil riset menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Simpan Pinjam BUMDes di Desa Kedungpengaron, Kabupaten Lamongan sudah berlangsung optimal serta memberikan dampak positif bagi peningkatan UMKM masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan melalui terpenuhinya empat indikator implementasi kebijakan menurut Cheema dan Rondinelli, yaitu kondisi lingkungan yang mendukung pelaksanaan program, hubungan antarorganisasi yang terjalin secara sinergis antara Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes, kapasitas sumber daya lembaga yang memadai, serta karakteristik dan kemampuan agen pelaksana dalam mengelola program. Program simpan pinjam memberikan kemudahan akses permodalan untuk para pelaku UMKM, sehingga sanggup memacu pertumbuhan bisnis mereka, meningkatkan pendapatan, dan memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat desa.

Implementasi program sekaligus memberikan pengaruh baik bagi peningkatan taraf hidup warga. Hal tersebut terlihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, tersedianya akses pembiayaan yang lebih mudah dan terjangkau, meningkatnya kemandirian pelaku usaha, serta terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Namun demikian, operasionalisasi program tetap tidak terlepas dari beberapa tantangan, seperti keterlambatan pembayaran angsuran, penggunaan dana pinjaman yang belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif, serta keterbatasan kapasitas pengelola dalam aspek administrasi dan pengawasan.

Oleh karena itu, perlu adanya pembinaan serta peningkatan kualitas SDM pengelola, penguatan sistem pengawasan, serta pendampingan kepada penerima pinjaman agar dana yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha. Dengan perbaikan tersebut, Program Simpan Pinjam BUMDes diharapkan mampu menghadirkan dampak yang jauh lebih luas dan berkelanjutan serta meningkatkan UMKM dan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi referensi bagi desa lain dalam mengembangkan program serupa sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah masing-masing.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengelola BUMDes diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan terhadap pemanfaatan dana pinjaman agar digunakan secara produktif serta meningkatkan kedisiplinan dalam pengelolaan dan penagihan angsuran guna menjaga keberlanjutan program. Selain itu, upaya pengembangan keterampilan SDM melalui program pelatihan di bidang administrasi serta pengelolaan keuangan perlu diadakan secara berkelanjutan supaya pengelolaan program menjadi lebih profesional dan akuntabel.

Pemerintah Desa diharapkan terus memberikan dukungan melalui pembinaan, evaluasi, dan penguatan permodalan sesuai kebutuhan program. Di sisi lain, masyarakat sebagai penerima manfaat diharapkan memanfaatkan dana pinjaman untuk pengembangan usaha serta memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman secara tepat waktu. Dengan demikian, diharapkan bisa berjalan lebih optimal, berkelanjutan, serta menjadi model pengembangan ekonomi desa yang bisa diterapkan pada desa lain dengan menyesuaikan karakteristik dan potensi masing-masing desa.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Abdullah, S. (2005). DESENTRALISASI: KONSEP, TEORI DAN PERDEBATANNYA. *Jurnal Desentralisasi*, 6 No.4, 57–72.
- Alwi, M., Suastika, I. N., & Lasmawan, I. W. (2023). PERAN BUMDES DALAM MENOPANG MODAL USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DESA TEBABAN. 9(6). <https://doi.org/10.30739/istiqro.v9i2.1818>
- Anandita, T. U., & Sukmana, H. (2026). STRATEGI BUMDES DALAM PENGEMBANGAN PROGRAM SIMPAN PINJAM BAGI MASYARAKAT DESA DUKUHSARI KECAMATAN JABON SIDOARJO PENDAHULUAN Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya memperkuat proses pembangunan nasional di berbagai sektor . Upaya tersebut tamp. 14(1), 18–34.
- Haryanto, R., & Mariatul Fitri. (2019). kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat duri di tengah social distancing pandemi covid-19. *AL QOLAM Jurnal Dakwah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 3(2), 133–146.
- Mulia, R. A. (2019). INFLUENCE OF PUBLIC POLICY, PARTICIPATION OF COMMUNITY AND EDUCATION LEVEL TO PUBLIC WELFARE IN PADANG PARIAMAN DISTRICT. *Jurnal El-Riyasah*, 10, 37–56.
- Noveri, I. V. (2020). Analisis Pengaruh Program Simpan Pinjam BUMDes Terhadap Peningkatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Masyarakat Desa Kumantan Kecamatan Bangkinang Kota Ditinjau Menurut Ekonomi Syariah. UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nurfiyani, F., Indriana, H., Gandi, R., & Barlan, Z. A. (2024). Persepsi Pelaku Usaha terhadap Efektivitas Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Kasus : BUMDes Cikarawang , Kecamatan Dramaga , Kabupaten Bogor , Jawa Barat) Business Actors Perception of the Effectiveness of the Savings and Loa. 08(01), 80–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.29244/jskpm.v8i01.1223>
- Sills., D. L. (1969). International Encyclopedia of the Social Sciences. *Social Work*, 14, 370–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sw/14.2.109>
- Widowati, T., Sigiyo, B., Diana, B. A., Publik, A., & Terbuka, U. (2026). Optimalisasi Program Simpan Pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Desa Kalimanah Kulon. 33(April). <https://doi.org/https://doi.org/10.59725/de.v33i1.424>
- Yupita, S., & Afrizal. (2024). KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PENGELOLAAN UNIT SIMPAN PINJAM DI DESA KOTO PAIT BERINGIN DOI: 3, 451–459. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/publicness.v3i4.206>

Buku

- Creswell, J. W. (2015). *Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research*. Delhi : PHI Learning Private Limited.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen pemberdayaan masyarakat* (T. S. Razak (Ed.)). DE LA MACCA.
- Kasmad, R. (2018). *STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PUBLIK*. KEDAI AKSARA.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *QUALITATIVE DATA ANALYSIS A METTHODS SOURCEBOOK* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Nonci, N. (2017). *IMPLEMENTASI PROGRAM GERNAS KAKAO (Studi Kebijakan Program Gernas Kakao di Kabupaten Luwu* (N. Nonci (Ed.)). CV SAH MEDIA.
- Sugiyono. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R&D*. ALFABETA,CV.
- Sugiyono. (2022). *METODE PENELITIAN KUALITATIF*. ALFABETA.
- Terry, G. R., & Rue, L. W. (2019). *DASAR-DASAR MANAJEMEN* (B. sari Fatmawati (ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.

Dokumen

- Kementerian Desa PDTT, _ . (2015). *MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA*. 1–11.
- Litvack, J., Seddon, J., Ahmad, J., Blair, H., Esmail, T., Ford, J., Hoffman, B., Kerr, G., King, E., Lutz, E., Mclean, K., Sewell, D., Shah, A., Tommaso, G. De, & Weist, D. (1999). *Decentralization Briefing Notes* (J. L. & J. Seddon (Ed.); WBI Workin). World Bank Institute.
- Scneider, A. (2003). *who gets what from whom? the impact of decentralisation on tax capacity and pro-poor policy* (169). [www. gtzsfdm.or.id/lib_pa_doc_on_dec.ht m](http://www.gtzsfdm.or.id/lib_pa_doc_on_dec.htm)
- Sills., D. L. (1969). International Encyclopedia of the Social Sciences. *Social Work*, 14, 370–379. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/sw/14.2.109>

Tesis

- Sari, I. wulan. (2025). *pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat di BMT assyafi'iyah berkah nasional kota metro*. institut agama islam negeri metro.
- Syafira, S. N. (2023). *IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2022 DI DESA BANJARAGUNG KECAMATAN KAJORAN KABUPATEN MAGELANG*. UNIVERSITAS TIDAR.

Regulasi

- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Kementrian Desa PDTT, _ . (2015). *MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA*. 1-11.